

KEBIJAKAN ALTERNATIF POLITIK KESEHATAN NASIONAL

Prof. Dr. Ir. Budi Santoso., M.Sc., APU.¹

Abstract

Public health and personal health can be best promoted through sound politics of health of a country. Tackling the roots of health problems with the subsequent solutions require the focus on the up -stream areas to insure the betterment of health of individuals and the public—since most social problems such as drug abuses and terrorism are by-product of “sick society”. This paper identifies roots of health in the up -stream areas in order to quickly diagnose the diseases both individually and the public. This approach is in line with the one in Physiotherapy as developed by Arief S Rahmat.

Keywords : alternative nation-wide politics of health, up-stream areas, identification of roots of health problems, welfare.

PENGANTAR

Ilmu kesehatan mencakup ilmu kedokteran, farmasi, gizi, lingkungan ketabiban dan kesehatan alternatif. Tujuan masing-masing ilmu tersebut bagi umat manusia adalah untuk memperoleh hidup yang sehat. Orang yang sehat tidak sakit, tapi orang tidak sakit belum tentu sehat. Karena begitu penting dan luasnya ilmu kesehatan maka dibentuk dalam kabinet pemerintah Kementerian Kesehatan (sebelumnya disebut Departemen Kesehatan). Politik kesehatan nasional NKRI menggariskan kesehatan sebagai investasi nasional, yang mencakup komitmen pemerintah dalam menyehatkan seluruh masyarakat sebagai amanat dari Proklamasi 1945.

Dalam pengembangan ilmu Kesehatan muncul Fakultas Kedokteran, Farmasi, Lingkungan, Gizi dan sebagainya, namun Fakultas Kesehatan sendiri belum pernah ada, yang ada adalah kesehatan lingkungan dan masyarakat, dengan titik berat pada kesehatan ibu dan anak, serta lingkungan bersih. Terkait dengan kesehatan ini banyak rumah-rumah sakit yang menangani orang sakit, tapi belum ada rumah sehat. Ini disebabkan karena paradigmanya bahwa kondisi sehat penanganannya diserahkan pada masing-

¹ Dosen Fakultas Teknik Sains dan Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional

masing individu, keluarga, masyarakat yang berkepentingan sehingga dianggap tidak memerlukan kebijakan pembinaan kesehatan secara nasional.

Sehat itu nikmat, bagi agama Islam, sehat itu amanah, yang tidak memelihara kesehatan itu dzolim. Orang dzolim susah untuk mendapatkan ridlo Allah dan akan memperlihatkan perilaku yang kurang sehat pula. Perilaku kurang sehat antara lain, egois, ingin menang/untuk kepentingan sendiri/ golongannya, sombong, takabur, korup, teror, malas. Namun apabila seorang itu sehat lahir batin, hidupnya dalam ridlo Allah, maka masyarakat yang unsurnya adalah manusia sehat akan turun ridlo Allah kepada masyarakat bangsa dan negara yang baldatun, toibatun warobun gafur. Inilah kuncinya membangun individu sehat, untuk memperoleh masyarakat, bangsa dan negara sehat.

Identifikasi Hulu Kesehatan Individu

Tubuh manusia bekerja melebihi kecanggihan mesin apapun yang pernah diciptakan manusia. Suatu produk hasil teknologi yang telah dipasarkan pasti memiliki petunjuk operasional dan petunjuk perawatannya. Manusia dan makhluk lainnya sebagai ciptaan Allah, pasti ada pula petunjuk operasional dan perawatannya yang disediakan Allah. Namun petunjuk tersebut perlu dibaca, dimengerti melalui riset atas hukum-hukum alam. Beberapa petunjuk yang tak mungkin terjangkau oleh penalaran biasa, diwahyukan melalui utusanNya. Contoh petunjuk kesehatan melalui sabda Rasulullah SAW." *Hendaklah kalian menggunakan dua obat, yaitu madu dan Al-Quran, selalu bangun sebelum Subuh, pola makan adan pola hidup yang benar*", makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, makan makanan yang halalan toyibah". Al-Baqarah ayat 168 yang menyatakan: "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; (QS. al-Baqarah: 168)* Rasulullah saw.juga memberikan himbauan lewat sabdanya: "*Suumu tashihu*" artinya "*berpuasalah engkau akan sehat*". (HR. Ibnu Suni dan Abu Nu' ain dari Abu Hurairah dalam Kitab at-Thib).

Di pihak lain, Elie Metchnikoff yang merupakan pemenang Nobel Biologi menyatakan bahwa sumber dari segala penyakit berada di dalam usus kita, hal ini diakui oleh pakar kesehatan di seluruh dunia. Dipercaya 80% dari penyakit yang timbul dari timbunan toksin berpangkal dari dalam perut kita [2].

Metabolisme dalam tubuh menentukan sehat tidaknya seorang. Metabolisme ini dikuasai oleh lima organ tubuh yaitu lambung, liver, ginjal, jantung dan paru-paru. Inilah hulu dari kesehatan seseorang. Apabila ke lima organ tubuh itu baik, maka metabolisme dan jasmani orang tersebut. Bekerja dengan baik, sehatlah orang tersebut, terganggunya apabila salah satu ada yang terganggu akan organ tersebut berdampak pada terganggunya perilaku seseorang [2]. Metabolisme itu melalui proses sebagai berikut. Diawali oleh asupan makanan yang dicerna lambung, sari makanan dikirim ke liver, liver memproduksi semua kebutuhan tubuh, termasuk darah merah, darah putih, mineral, enzyme, vitamin dan sebagainya. Kualitas dan kuantitas sari makanan menentukan pula kualitas dan kuantitas produk liver yang diperlukan tubuh. Kuantitas sari makanan yang kurang maupun lebih akan menentukan jenis penyakit yang akan timbul. Mereka yang kelebihan glukosa akan cenderung tensi naik dan diabet, yang kurang kadar gula cenderung tensi turun, dan mudah terkena hepatitis atau tipus. Kelebihan beban pada liver atau kekurangan gizinya dapat membuat seorang emosional. Oleh sebab itu penyebab-penyakit adalah lambung sedangkan awal dengan tipe penyakitnya dimulai dari liver. Dengan demikian hulu dari sehat ada pada pola makan dan pola hidup seseorang.

Kualitas asupan, berupa makanan dan minuman harus halalan toyibah. Seorang penderita tensi darah tinggi, daging kambing walaupun halal ia tak toyibah, karena dapat membuat penderita stroke. Apalagi kalau asupan tidak halal, maka ia akan mengkontaminasi tidak saja hulu biologis (lambung, liver, ginjal, jantung dan paru-paru), tapi akan masuk sampai pada hulunya hulu yaitu ruhaniah. Apabila penyebab penyakit yang bersifat hulu ini tak dicegah, maka pengobatan apapun tidak akan menyembuhkan penderita. Itulah sebabnya jenis-jenis penyakit tertentu akan selalu bergantung pada obat seumur hidup, dimana pengobatan yang diberikan oleh dokter baru menanggulangi sisi akibat, atau sisi hilir yang bersifat pencegahan/ menghilangkan keluhan. Secara empiris penanganan sisi hulu sebagai dikembangkan Arridlo ternyata memberikan terobosan baru dalam dunia kesehatan dan kedokteran sebagai metode yang bersifat komplementer. Banyak pasien yang berdasar ilmu kedokteran dan kesehatan mengalami jalan akhir (sudah tidak ada jalan keluar lagi), seperti misalnya penderita stroke, diabetes, gagal ginjal, dapat disembuhkan dengan metode hulu ini. Bila metabolisme yang dikuasai oleh lima organ tubuh itu diterapi, maka banyak penyakit akan sembuh dengan sendirinya.

Permasalahan Hilir dan Hulu Kehidupan

Kunci sukses hidup manusia adalah mengenali jati dirinya. Allah berfirman: “Tiada Aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaKu”. Penciptaan itu melalui suatu proses. Dari alam arwah (alam ruh) ia ditiupkan ke dalam alam rahim. Di alam ini, ia menjalani kehidupan selama sekitar sembilan bulan sepuluh hari. Alam rahim merupakan alam transisi atau pintu pertama masuk ke alam dunia. Di dunia inilah kita sekarang hidup. Meskipun tidak terlalu lama, rata-rata kurang dari seratus tahun, tapi kehidupan ini menjadi hulu perjalanan selanjutnya. Di alam dunia ini manusia ikut berperan karena diberikan wewenang memilih menentukan arah perjalanan menuju alam akhirat melalui beberapa pintu lagi. Dari alam dunia melalui pintu sakaratul maut masuk ke alam kubur, dari alam kubur masuk ke alam kebangkitan melalui alam pintu kiamat, dari alam kebangkitan menuju alam akhirat melalui pintu alam hisab. Karena seluruh perjalanan sifatnya ghaib, tidak mungkin dicerna oleh akal manusia, maka petunjuk operasionalnya diberikan melalui wahyu khususnya bagi umat Islam berupa kitab Al Qur'an.

Di akhir perjalanan itulah manusia dimintai pertanggung jawaban atas wewenang yang telah diberikan. Selama di dunia manusia yang baik amalnya akan mendapat hadiah berupa kehidupan syurga yang nikmat, bahagia, sedang yang gagal buruk amalnya akan mendapat kehidupan neraka yang pedih, susah.

Senang/bahagia-susah, pedih-nikmat adalah terkait dengan rasa. Itulah rahasia rasa yang melekat pada diri manusia. Seandainya tidak ada rasa, maka tidak dapat diketahui adanya syurga dan neraka karena tidak bisa dirasakan. Di dunia ini, rasa diaktualisasikan oleh sistem syaraf. Demikian juga pada makhluk hewan. Menggunakan ilmu pengetahuannya manusia dapat mengeliminasi rasa biologis dengan obat bius atau tusuk jarum. Saat tidak ada kesadaran, biologis badan masih tetap hidup karena ada daya hidup yang kita namakan saja nyawa. Hubungan erat antara ruh dan nyawa menjadi jiwa, yang dapat diamati sifatnya melalui tingkah laku seseorang. Apabila ketidak sadaran itu bersifat permanen, karena terjadi kerusakan otak, maka keadaan demikian disebut dengan *brain death*. Brain death dapat di uji dengan memberikan stimulasi pada telinga dalam yang tak akan memberikan respon.

Dari pengertian tentang hilang rasa saat terjadi hilangnya kesadaran, sementara orang menjadi skeptik atau bahkan tidak perlu mempercayai

adanya syurga dan neraka. Lebih-lebih sukses dunia dapat pula dicapai tanpa perlu mengindahkan norma-norma agama. Inilah keterbatasan manusia yang tidak mendapat hidayah ilahiah. Semua makhluk mendapat hidayah fitrah, namun hanya manusia yang mendapat hidayah akal. Selanjutnya tidak semua manusia mendapat hidayah ilahiyah, bahwa rasa itu akan terbawa (*carry over*) dalam alam-alam selanjutnya. Bentuk aktualisasi rasa di alam berikutnya pasti bukan dalam bentuk syaraf seperti di dunia. Malahan meskipun mendapat hidayah ilahiyah, banyak pula yang tertipu oleh fatamorgana kehidupan dunia. Bayangkan orang yang tensi tinggi, ia harus pantang makan makanan seperti jerohan dan daging kambing, karena makanan ini akan berdampak pada kenaikan tensi bahkan stroke meskipun daging kambing tersebut halal, (ia beli dengan uang halal). Ia tidak toyibah baginya. Apa yang terjadi kalau makanan itu tidak halal, pasti ia tidak toyibah, walaupun jangka pendeknya kelihatan toyibah. Mereka yang mengambil jalan pintas memperoleh kekayaan atau makanan dengan jalan tidak halal, seperti mencuri, menipu, korupsi dan kejahatan lainnya, cepat atau lambat akan menderita sakit. Sumber penyakit tidak saja bisa datang dari masalah kelima organ tubuh (lambung, liver ginjal, jantung, paru-paru) tapi lebih dari itu datangnya dari hulunya hulu yaitu ruhaniah atau kejiwaan. Sadar atau tidak sadar, manusia terikat oleh hukum alam dan hukum ilahiah.

Identifikasi Hulu Kesehatan Masyarakat.

Masyarakat yang sehat adalah karena unsur masyarakat yaitu individunya sehat. Masyarakat yang sakit, memunculkan beragam jenis penyakit seperti korupsi, narkoba, *kriminalitas*, *terorisme*, *illegal trafficking* dan sebagainya. Mengobati penyakit masyarakat dengan penanganan khusus bila statusnya telah mencapai derajat luar biasa (kejahatan luar biasa) telah dilakukan melalui pembentukan institusi yang khusus menangani masalahnya seperti BNN untuk narkoba, Densus 88 untuk teror, KPK untuk korupsi. Analogi dengan uraian kesehatan individu di atas, bila hulunya tidak ditangani maka penanganan kejahatan yang bersifat luar biasa dan bersifat akibat / hilir ini akan terjadi selamanya bahkan dengan intensitas yang makin meningkat.

Yang menjadi pertanyaan adalah sisi hulu kesehatan masyarakat itu letaknya dimana?

Pertanyaan ini tidak mudah dijawab, tapi mari kita membuat dugaan/hipotesa, bahwa masyarakat sakit karena unsur pembentuk masyarakat yaitu

individu sakit. Individu sakit karena pola makan dan pola hidup yang kurang baik. Dengan demikian kunci penyehatan masyarakat adalah memperbaiki pola makan dan pola hidup individu. Pola makan dan pola hidup yang baik dapat dicapai bila tersedia lapangan pekerjaan yang sesuai pendidikan, sesuai karir sesuai suasana batin. Yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan adalah perindustrian baik barang maupun jasa. Oleh sebab itu kebijakan industri menjadi sangat penting karena menjadi hulu dari kebijakan lainnya. Produktivitas nasional memberikan indikator kemakmuran suatu bangsa.

Dengan wacana suatu desain nasional secara global dengan visi yang realistis, ditentukan tujuan jangka panjang, menengah dan pendek, dilukiskan sasaran-sasarannya, maka dapat ditarik mundur apa yang harus dilakukan sekarang, peran pemerintah dengan kementeriannya, peran pemerintah daerah sampai peran swasta. Ada keterkaitan/ keterintegrasi kebijakan mulai dari industri yang telah ditetapkan sebagai komitmen politik nasional, ditarik mundur untuk penjabaran bagaimana penelitiannya, pendidikannya, sistem moneter, sistem investasi dan sebagainya. Bila investasi hanya didasarkan pada penyerapan tenaga kerja maupun pertumbuhan ekonomi, maka jangka panjangnya akan mengalami kesulitan karena konsep dasar keterintegrasi tidak kuat.

Banyak negara seperti Korea, Singapore, Taiwan, Cina, dan Negara Barat mampu mendesain konsep pembangunannya secara terintegrasi, terlihat misalnya pada tata ruang, tata kota, tata industri. Keterintegrasi ini terlihat sebagai cerminan keintegrasi nasional. Kelihatannya ada korelasi antara banyaknya pengangguran dengan berkembangnya penyakit masyarakat. Penegakan hukum dengan hukuman dalam penjara para pelaku kejahatan yang makin bertambah menjadi beban kepada pemerintah, karena para tahanan harus makan sementara mereka tidak produktif.. Ini dapat menumbuhkan penyakit baru seperti adanya kesan penjara sebagai agen narkoba. Lain halnya negeri yang mampu menyerap tenaga kerja, seperti Singapore misalnya, para napi diberi pekerjaan seperti cuci pakaian, seterika dan berbagai pekerjaan perhotelan, yang bisa dikerjakan di penjara atau di luar hotel. Dari hasil kerja ini, bukan saja para napi dapat bekerja, untuk kebutuhan hidupnya bahkan mampu membangun penjara sampai sebagai hotel.

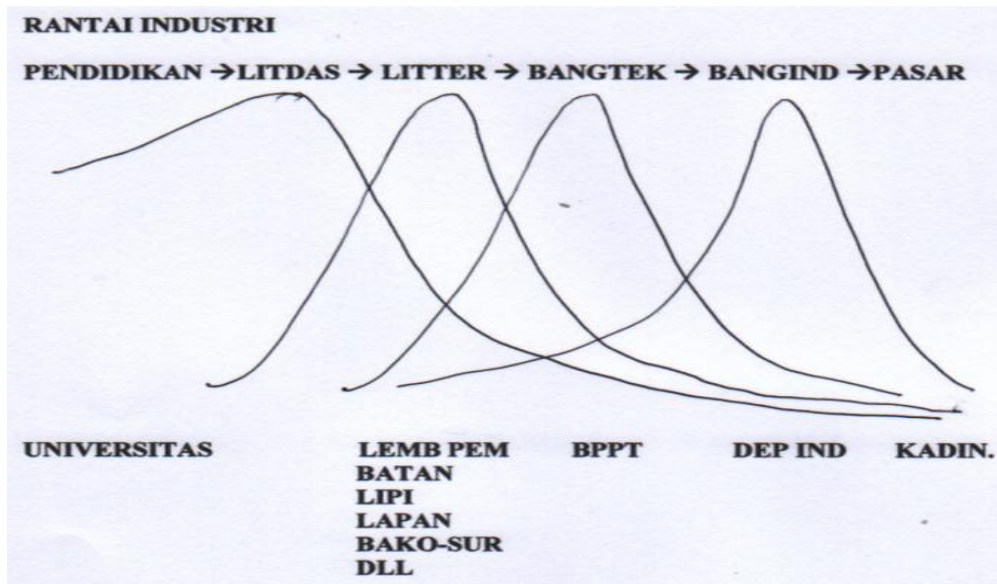
Keterkaitan Antar Kebijakan

Kebijakan kesehatan nasional sangat erat hubungannya dengan kebijakan industri. Kebijakan kesehatan nasional kuncinya adalah menyediakan pola makan dan pola hidup individu secara baik. Ini memerlukan tersedianya lapangan kerja yang menjamin kecukupan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan pokok saja belum cukup untuk menyehatkan kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara, karena diperlukan juga pola hidup yang baik, menserasikan lancarnya roda kehidupan, sejak bangun tidur, transportasi, bekerja di tempat kerja, beristirahat di rumah sebelum tidur kembali. Penyediaan lapangan kerja terdapat di industri baik barang maupun jasa. Dengan kebijakan industri yang tepat dapat ditarik mundur, kebijakan pengembangan teknologi yang sesuai, ditarik mundur lagi kebijakan penelitian (riset dan teknologi) yang sesuai, ditarik mundur lagi kebijakan pendidikan yang sesuai.

Saat ini telah tersusun 35 Roadmap Pengembangan Klaster Industri Prioritas, yakni: Industri Agro, Industri Alat Angkut, Elektronika dan Telematika, Industri Material Dasar, Industri Permesinan, Industri Manufaktur Padat Tenaga Kerja, Industri Penunjang Industri Kreatif dan Kreatif Tertentu, Industri Kecil dan Menengah Tertentu

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya daya saing Indonesia adalah adanya peningkatan biaya energi, tingginya biaya ekonomi, serta belum memadainya layanan birokrasi. Tantangan lain yang dihadapi industri nasional adalah kelemahan struktural sektor industri itu sendiri, seperti masih lemahnya keterkaitan antar industri, baik antara industri hulu dan hilir maupun antara industri besar dengan industri kecil dan menengah, belum terbangunnya struktur klaster (industrial cluster) [5].

Dalam kebijakan industri ini tidak ada terkait dengan pendukungnya sebagai terlukis dalam diagram berikut :



Sumbu ke atas adalah intensitas peranan lembaga, sumbu mendatar adalah gradasi kompetensi mulai dari pendidikan keilmuan termasuk penelitian dasar di Universitas, penelitian terapan oleh Lembaga Pemerintah (BATAN, LIPI, LAPAN, BAKOSURTANAL). Kajian teknologi oleh BPPT, pengembangan teknologi dan industri oleh Departemen/Kementerian Perindustrian, sampai masalah pemasaran oleh KADIN.

Tanpa didukung oleh kuatnya rantai industri, maka perindustrian kita akan 'menari dalam musik/gendang' yang ditentukan oleh pihak investor pemilik modal. Tanpa ada keterkaitan antar masing-masing kegiatan, akan mempersulit juga memperkirakan volume pekerjaan yang harus diberikan pada individu yang bekerja pada suatu lembaga, perusahaan, pegawai negeri dll. Demikian juga tanggap dinamik terhadap suatu kompetisi melawan pesaing asing akan susah dilakukan dalam masalah apapun. Saya teringat pada laporan Prof. Baiquni (alm) yang pernah menjabat duta besar di Swedia. Bahwa Kadin Swedia selalu memonitor perkembangan pasar dunia, atas barang-barang produk baru yang ngetrend. Info ini langsung ditanggapi oleh pemerintah daerah maupun pusat, dengan melakukan pertemuan antara Kadin, Pemerinath dan Perguran Tinggi/Pusat-pusat penelitian dan Pengembangan. Apa yang dapat dilakukan untuk ikut mengambil kesempatan yang lagi ngetrend ini. Selama ini janganakan mampu menanggapi yang lagi ngetrend, memberdayakan tenaga pengangguran masih belum optimal. Selain

itu masih ada tiga komponen ekonomi yaitu modal, lahan dan mahasiswa secara ekstrem dikatakan masih tidur.

Saya berterima kasih kepada sesama peneliti dari sesama negara berkembang yang banyak membantu memberikan kemudahan info ilmiah saat saya jadi peneliti. Mereka dimudahkan oleh peran atase ilmiah/pendidikan mereka mengakses info perkembangan ilmu di negara mereka bekerja. Mungkin ini juga yang dapat saya amati, mengapa posisi-posisi sekretarese di lembaga-lembaga internasional diduduki oleh sekretarese dari negara-negara Singapore, Malaysia, India, China, Vietnam, Thailand, dll, tapi tidak dari Indonesia. Adanya pekerja-pekerja Indonesia di negeri asing lebih banyak didominasi oleh TKW, yang sering secara keliru dianalogikan sebagai perdagangan manusia.

Peran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Hampir setiap negara memiliki lembaga semacam itu, apakah secara eksplisit berbentuk lembaga negara, lembaga pemerintah atau fungsinya dititipkan pada lembaga yang ada. Khususnya Dewan Ketahanan Nasional Indonesia (Wantannas) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang disusun berdasar Keputusan Presiden No. 101 tahun 1999, Wantannas mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Wantannas mempunyai fungsi: a. Penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia; b. Penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara; c. Penetapan resiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan pengalokasian sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan. Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Sejak 2010 sampai dengan bulan September 2012 Setjen Wantannas telah melakukan berbagai pemikiran untuk mengatasi berbagai masalah krusial mendesak merujuk pada penjabaran dari Keppres 101 tahun 1999 tentang Wantannas dan Setjen Wantannas dengan tetap memperhatikan program prioritas Kabinet Indonesia Bersatu II yang mencakup 14 program prioritas yaitu (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (2) Pendidikan (3)

Kesehatan (4) Penanggulangan Kemiskinan (5) Ketahanan Pangan (6) Infrastruktur (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha (8) Energi (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik (11) Budaya, Kreativitas dan Teknologi Tinggi (12) Prioritas Lainnya Bidang Polhukam (13) Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian (14) Prioritas Lainnya Bidang Kesra. [10]

Banyak kalangan yang kurang dapat membedakan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Wantannas dengan Lemhannas.

Lembaga Ketahanan Nasional, disingkat **Lemhannas**, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategik ketahanan nasional dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Keppres No. 42 dan 43 tahun 2001 [JAKARTA] Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dalam kajiannya menemukan fakta bahwa ketahanan nasional Indonesia tidak tangguh alias rapuh. Kesimpulan itu diambil berdasarkan pengkajian pengukuran ketahanan nasional dari 33 provinsi yang ada di Indonesia dengan 847 indikator.

“Hasilnya sampai tahun 2012, ketahanan nasional kita tidak tangguh. Apa karena struktur kelembagaan negara, kultur kita setelah reformasi, atau prosesnya yang salah,” kata Deputy Bidang Pendidikan Lemhannas, Mayjen TNI (Purn) I Putu Sastra dalam diskusi bertajuk “*Menata Ulang Sistem Bernegara*” di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (13/11). [11]

Ke depan

Wantannas menurut pendapat saya seyogianya menjadi *thinktank* Presiden yang lebih menekankan pada masalah hulu, masalah filosofis, untuk menjawab *are we doing the right things?* Masalah ketahanan nasional adalah masalah keuletan bangsa dan daya tahannya dalam menghadapi berbagai ancaman. Perumusan berbagai ancaman baik militer maupun non-militer perlu dikaji dan disajikan secara mendasar. Ancaman non militer ini menyangkut masalah yang luas seperti system perekonomian, system politik, system sosial budaya, perkembangan teknologi, sumberdaya alam, energi, bagaimana membangun keterintegrasian semua komponen bangsa, sehingga terjalin keterintegrasian ibarat sapu lidi yang ulet. Dengan menguji keterintegrasian hulu dapat disusun suatu visi kenegaraan yang menjadi konsep pegangan bagi siapa pun yang akan menjadi presiden. Dengan demikian setiap ada pidato kenegaraan, Presiden dapat memberikan

gambaran hulu dan hilir lebih dari sekedar menjawab *are we doing things rightly*.

Kajian-kajian dapat dimulai dari berbagai hulu pada tingkatannya. Keterintegrasian hulu pada kelembagaan tinggi negara, pada system produktivitas nasional, pada balans penggunaan sumber daya alam, dan lingkungan, keterintegrasian dan keserasian hubungan pusat daerah dengan segala ancaman yang mungkin terjadi. Apabila konsep kebijakan alternatif kesehatan ini dapat dicerna dan diterima, maka sebagai hulunya dapat dijabarkan bagaimana implementasinya.

Kebijakan Alternatif Kesehatan

Kebijakan-kebijakan yang ada tidak saling terkait sehingga tidak saling memperkuat. Perlu adanya koordinasi yang baik, karena yang sering menjadi masalah utama adalah lemahnya koordinasi. Hal ini karena tidak disadari bahwa koordinasi hanya bisa dilakukan kalau sejak awal ada keterkaitan ‘koordinat’. Ambillah kebijakan kesehatan nasional sebagai koordinat utama, maka kebijakan politik kesehatan nasional yang menetapkan pola hidup termasuk pola makan yang benar sebagai koordinat pokok seterusnya dijabarkan melalui *grand design nasional* sebagai berikut:

- a. Bagaimana kebijakan investasi nasional yang tidak saja ditujukan kepada peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus terintegrasi dengan kebijakan industri, ristek, pendidikan pemasaran dan tata ruang. Keterintegrasian kebijakan ini perlu tertuang baik dalam perundangan maupun kebijakan pelaksanaannya.
- b. Bagaimana mengembangkan rumah-rumah sehat yang memberikan acuan program sehat untuk meningkatkan kebugaran jasmani ruhani. Kalau Rumah Sakit selalu didukung oleh Fakultas Kedokteran, maka Rumah Sehat didukung oleh Fakultas Kesehatan. Ilmu kesehatan ini dikembangkan untuk cegah dini/ mengantisipasi jangan sampai orang sakit, sehingga biaya perawatan menjadi lebih murah, hidup bahagia mencegah berkembangnya penyakit masyarakat. Olah raga nasional akan berkembang tidak saja dalam pembinaan teknis olah raga tetapi harus dibarengi pembinaan stamina lahir batin yang lebih banyak dapat dikembangkan dalam rumah sehat maupun fakultas kesehatan.

- Kebangkitan olah raga nasional tidak saja dapat menambah bangkitnya rasa nasionalisme tetapi juga bangkitnya industri olah raga nasional.
- c. Dalam kaitan dengan kebijakan ini, seorang Presiden sebagai kepala Negara perlu memiliki visi dan berjiwa, bersemangat sebagai negarawan. Dalam pidato kenegaraan setiap tahunnya di depan DPR selama ini lebih memberat pada pidato presiden sebagai kepala pemerintahan, bukan pidato kenegaraan presiden sebagai kepala negara. Sebagai kepala Negara ia harus mampu merepresentasikan dirinya mewakili seluruh lembaga Negara, seluruh rakyat Indonesia dan seluruh bangsa bukan dalam arti detil teknisnya, tetapi dalam hal permasalahan yang lebih filosofis lebih hulu . *Are we doing the right things?* Bukan sekedar menjawab, *are we doing things rightly!*. Yang terakhir dapat diserahkan pada para menteri terkait, diberikan forum tersendiri. Dan ini harus berlaku juga bagi lembaga tinggi Negara yang lainnya dalam rangka keterbukaan memberikan kanal komunikasi antar lembaga dan rakyat. Salah satu contoh forum komunikasi yang telah berjalan adalah lawyer club.
 - d. Kebijakan alternatif politik kesehatan nasional sangat erat terkait dengan kebijakan industrialisasi dan investment dan seluruh kebijakan derivatnya. Dengan pola ini akan terjadi rumusan yang sederhana sebagai acuan Bappenas dalam merumuskan program pembangunan nasional, sehingga dapat dihindari ketidak tahuan sasaran apa yang dicapai Dalam banyak hal rencana program pembangunan nasional merumuskan sasaran dalam bentuk rumusan ‘ peningkatan ini dan itu’, yang memberikan kesan kurang pahaman merumuskan sasaran yang lebih realistik. Dengan rumusan kalimat ini, memang memudahkan laporan pertanggung jawaban seperti laporan dalam bentuk kalimat“ telah tercapai peningkatan ini dan itu’, namun belum menjamin sasaran riil yang seharusnya dicapai.

SIMPULAN DAN SARAN

Dengan model sehat individu akan menyehatkan masyarakat, bangsa dan negara, maka kebijakan alternatif politik kesehatan nasional dapat dijadikan koordinat pokok dalam membuat keterkaitan seluruh kebijakan politik nasional yang ada.

Rumusan visi nasional dapat diajukan oleh Presiden sebagai Kepala Negara, konsep awal ditugaskan kepada Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Konsep ini menjadi acuan mirip seperti GBHN di era orde baru, namun ada beda nyata dari sisi keterintegrasian dengan memilih kebijakan Politik Kesehatan Nasional sebagai koordinat utama.

DAFTAR PUSTAKA

[Http://Www.Bakohumas.Kominfo.Go.Id/News.Php?Id=1102](http://Www.Bakohumas.Kominfo.Go.Id/News.Php?Id=1102).

[Http://Www.Suarapembaruan.Com/Home/Lemhannas-Ketahanan-Nasional-Indonesia-Rapuh/44880](http://Www.Suarapembaruan.Com/Home/Lemhannas-Ketahanan-Nasional-Indonesia-Rapuh/44880)

Kebijakan Risteknas Jakstranas Iptek 2015-2019: Sebuah Catatan dan Gagasan dari LIPI

Kebijakan Pendidikan Nasional, Formal [Http://Staff Uny.Ac.Id.Site/Default/Files/,Formalhttp://Staff.Uny.Ac.Id/Sites/Default/Files/Kebijakan-Kebijakan%20pendidikan%20formal.Pdf](http://Staff.Uny.Ac.Id.Site/Default/Files/Formalhttp://Staff.Uny.Ac.Id/Sites/Default/Files/Kebijakan-Kebijakan%20pendidikan%20formal.Pdf)

Lambung News, Selasa 25 feb,2014, [www.ahlinya](http://www.ahlinya.lambung.com) lambung .com

Terobosan Baru Fisioterapi, Bugar Sampai Usia Lanjut, Budi Santoso, ISBN 978-14958-1-0, Jakarta 2014

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2009 Tentang, *Kesehatan*.

Undang Undang No. 5 Tahun 1984 *Tentang Perindustrian*, Diperbaharui Dengan Undang-Undang Tahun 2014

Kebijakan Industri Nasional,
[Http://Www.Kemenperin.Go.Id/Artikel/19/Kebijakan-Industri-Nasional](http://Www.Kemenperin.Go.Id/Artikel/19/Kebijakan-Industri-Nasional)

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2002, Tentang, *Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*.

UU No. 20 Tahun 2004, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Standar Nasional Pendidikan PP. No. 19 Tahun 2005.